

## Spasialisasi Kerentanan Sosial Ekonomi Terhadap Perkembangan Wilayah Pesisir Daerah Istimewa Yogyakarta

Yusliana<sup>1</sup>, Pegi Uumbu Lobu<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Yogyakarta

Korespondensi: [yusliana@itny.ac.id](mailto:yusliana@itny.ac.id)

### ABSTRAK

Salah satu yang menjadi tolak ukur dalam pengembangan wilayah adalah bagaimana tingkat kerentanan suatu wilayah secara sosial maupun secara ekonomi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengetahui tingkat kerentanan sosial ekonomi di wilayah pesisir D.I. Yogyakarta yaitu identifikasi sebaran serta tingkat kerentanan ekonomi di wilayah pesisir D.I. Yogyakarta yang selanjutnya dispasialkan dalam bentuk peta. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian berupa deskriptif kuantitatif dengan *tools* analisis menggunakan GIS. Metode skoring juga digunakan sebagai langkah awal menilai parameter untuk menentukan tingkat kerentanan. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat kerentanan sosial ekonomi di wilayah pesisir D.I. Yogyakarta di bagi menjadi 3 kategori yaitu tinggi, sedang, rendah dengan empat klasifikasi perkembangan wilayah. Wilayah maju adalah yang secara ekonomi tergolong kerentanan rendah dan secara sosial termasuk dalam kerentanan adalah Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sanden, Kecamatan Temon, Kecamatan Kretek, Kecamatan Wates dan Kecamatan Galur termasuk Kecamatan Panjatan wilayah berkembang yakni wilayah yang kerentanan ekonominya tinggi dan kerentanan sosialnya rendah terdapat di Kecamatan Tepus dan Kecamatan Panggang. Selanjutnya wilayah terbelakang berupa wilayah yang kerentanan ekonominya tinggi dan kerentanan sosialnya juga tinggi yaitu di wilayah Kecamatan Girisubo. Wilayah yang maju tapi tertekan yaitu wilayah yang kerentanan ekonominya rendah tetapi kerentanan sosialnya tinggi terdapat Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptori dan Kecamatan Srandakan.

Kata kunci: Spasialisasi, Kerentanan, Sosial, Ekonomi, Pesisir.

### ABSTRACT

*One of the benchmarks in regional development is how the level of vulnerability of a region is socially and economically. This research was conducted with the aim of knowing the level of socio-economic vulnerability in the coastal area of D.I. YOGYAKARTA, namely knowing the distribution and level of economic vulnerability in the coastal area of D.I. YOGYAKARTA which was then spatialized in the form of a map. The approach taken in this research is descriptive quantitative with analytical tools using GIS. The assessment method is also used as a first step in parameter assessment to determine the level of vulnerability. The results of the analysis show that the level of socio-economic vulnerability in the coastal area of Yogyakarta is divided into 3 categories, namely high, medium, with a classification of four regional developments. Developed areas are those that are economically classified as low vulnerability and socially included in vulnerability are Tanjungsari District, Sanden District, Temon District, Kretek District, Wates District and Galur District, Panjatan District. Developing areas are areas with high economic vulnerability and low social vulnerability. Tepus and Panggang sub-districts. Furthermore, underdeveloped areas are areas with high economic vulnerability and high social vulnerability, namely in the Girisubo District. The developed but depressed areas are areas with low economic vulnerability and high social vulnerability, namely Purwosari District, Saptori District and Srandakan District.*

*Keyword: Spatialization, Vulnerability, Social, Economic, Coastal*

### 1. PENDAHULUAN

Wilayah pesisir menjadi tempat pertemuan antara laut dan darat yang memiliki peranan penting dalam tatanan ekonomi sosial masyarakat yang menciptakan interaksi berbagai kegiatan lintas sektor seperti perikanan, pertanian, perdagangan dan kegiatan ekonomi sosial lainnya [1]. Umumnya karakteristik kawasan pesisir dapat dilihat karakter fisik dan karakter ekonomi dimana karakter tersebut menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam perkembangan wilayah [2]. Disisi lain sebagian besar masyarakat yang berada di kawasan pesisir memiliki mata pencaharian pada sektor pemanfaatan sumberdaya kelautan [3]. Secara umum pesisir D.I. Yogyakarta memiliki tingkat pendidikan yang rendah dan berada dalam lingkungan pemukiman yang belum tertata dengan baik dan terkesan kumuh (yusliana). Dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif berada dalam tingkat kesejahteraan rendah, maka dalam jangka panjang

tekanan terhadap sumberdaya pesisir akan semakin besar guna pemenuhan kebutuhan pokoknya [4]. Aspek sosial menjadi bagian yang paling sebuah pembangunan [5], sedangkan wilayah pesisir memiliki peranan yang sangat strategis sekaligus rentan terhadap perubahan lingkungan baik yang disebabkan oleh alam maupun aktivitas manusia, maka diperlukan keseimbangan dalam pemanfaatannya [4,6].

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki wilayah garis pantai sepanjang 126 kilo meter yang mencakup tiga kabupaten dengan sebaran 13 kecamatan pesisir. Hal ini memberikan posisi strategis dalam lalu lintas perekonomian di wilayah Samudra Hindia dengan potensi yang dapat dioptimalkan baik potensi laut maupun pesisir [7]. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005- 2025, Pemerintah D.I. Yogyakarta memiliki komitmen untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Ketimpangan wilayah terjadi karena kegiatan ekonomi di D.I. Yogyakarta masih terpusat di wilayah Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman. Tahun 2021 Nilai PDRB kedua wilayah ini mencapai 60% dari total PDRB D. I. Yogyakarta. Sementara itu, Kulon Progo dan Gunungkidul yang mencakup 65 % dari luas wilayah D. I. Yogyakarta, pangsa distribusi ekonomi dua wilayah ini terhadap D. I. Yogyakarta hanya sekitar 21%. Permasalahan ketimpangan yang sampai saat ini masih menjadi isu strategis dalam perencanaan pembangunan D. I. Yogyakarta yaitu isu ketimpangan kesejahteraan masyarakat antar wilayah [8]. Tingkat kemiskinan Kabupaten/Kota diwilayah Daerah Istimewa Yogyakarta angka tertinggi berada di Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Kulonprogo, dan Kabupaten Bantul dimana pada ketiga wilayah Kabupaten/Kota tersebut termasuk dalam kawasan pesisir. Isu tersebut menjadi permasalahan yang dapat menyebabkan kerentanan sosial dan ekonomi dikawasan pesisir D.I. Yogyakarta.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan bahwa kerentanan sosial sangat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang timbul akibat tingginya tingkat kemiskinan, tingginya pengangguran, rendahnya modal sosial dan manusia serta rendahnya upah minimum atau pendapatan keluarga yang pada akhirnya dapat menjadi ancaman [9,10]. Penelitian lain mengatakan bahawa kerentana sosial dapat dilihat dari rendahnya tingkat Pendidikan jenis mata pencarian masyarakat dan juga rendahnya usia produktif [11]. Sedangkan ekonomi menggambarkan tingkat kerapuhan dari segi ekonomi dimana sumber daya yang dimiliki seperti lahan produktif, PDRB maupun tingkat pekerjaan penduduk mengalami degradasi [12]. Jika dilihat dari penelitian sebelumnya, kerentanan lebih difokuskan pada aspek yang berhubungan dengan bencana dan belum ditemukan penelitian yang memiliki lokus yang sama. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait model spasial social ekonomi dengan fpokus variable pada aspek kepadudukan, fasilitas, PDRB dan lahan produktif.

## 2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kuantitatif yang digunakan untuk mengolah data yang bersifat narasi yang diterjemahkan kedalam bentuk peta dan deskripsi menggunakan Sistem Informasi Geografis (GIS). Pada pendekatan ini data yang digunakan berupa data spasial yang didapatkan dari instansi terkait serta data hasil intepretasi dari citra satelit menggunakan *tools* analisis yang ada pada aplikasi ArcGis untuk menghasilkan peta analisis [13,14]. Sedangkan pada pendekatan kuantitatif ditujukan untuk mengolah data numerik dalam bentuk skoring [15] yang digunakan untuk menentukan tingkatan kerentanan sosial. Selanjutnya metode skoring digunakan untuk menentukan tingkat kerentanan pada 13 kecamatan yang diukur dengan masing-masing variabel. Untuk variabel sosial diukur dengan tingkat pendidikan, usia produktif dan jumlah fasilitas dimasing-masing kecamatan, sedangkan variabel ekonomi diukur dari PDRB perkapita, luas lahan produktif dan mata pencarian. Seluruh variabel diberi skor, semakin baik kondisinya dalam hal ini variabel tingkat kemajuan wilayah maka skor yang diberikan semakin tinggi. Dimana kecamatan maju akan mempunyai total skor atau ranking lebih tinggi daripada kategori kedua (sedang) maupun kategori kecamatan ketiga (tertinggal). Hasil dari analisis skoring akan diinterpretasi dalam bentuk peta dan dilanjutkan dengan menggunakan *tools* analisis yang ada pada aplikasi ArcGis untuk menghasilkan peta kerentanan dan perkembangan wilayah.

## 3. HASIL DAN ANALISIS

### 3.1 Tingkat Kerentanan Sosial DAN Ekonomi

Tingkat kerentanan sosial ditentukan melalui variabel tingkat pendidikan, usia produktif dan sebaran fasilitas. Tingkat pendidikan diprediksi dengan melihat tingkat melek huruf, jika menunjukkan tanda negatif maka berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat pengangguran dan kemiskinan di wilayah pesisir D.I. Yogyakarta. Peningkatan angka melek huruf sebagai indikator pendidikan di kawasan pesisir D.I. Yogyakarta akan menurunkan kemiskinan yang berarti bahwa peningkatan angka melek huruf akan menurunkan kemiskinan di pesisir D.I. Yogyakarta. Dari data jumlah penduduk yang menempuh pendidikan pada masing-masing kecamatan terlihat bahwa Kecamatan Saptosari termasuk dalam kerentanan tinggi karena rasio jumlah penduduk yang menempuh pendidikan berjumlah 50,52 % atau 20.150 jiwa penduduk,

dan Kecamatan Tanjungsari berada pada tingkat kerentanan sedang dan 11 kecamatan lainnya berada pada tingkat kerentanan rendah. Lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1 Tingkat Kerentanan Pendidikan di Kawasan Peisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Penduduk yang menempuh Pendidikan (jiwa)	Rasio (%)	Kelas	Tingkat Kerentanan
1.	Purwosari	21.282	14.293	67,15	3	Rendah
2.	Tepus	37.008	26.533	71,69	3	Rendah
3.	Saptosari	39.880	20.150	50,52	1	Tinggi
4.	Tanjungsari	29.604	19.100	64,51	2	Sedang
5.	Panggung	29.822	20.228	67,69	3	Rendah
6.	Girisubo	25.950	18.763	72,3	3	Rendah
7.	Srandakan	31.245	22.350	71,69	3	Rendah
8.	Sanden	31.942	23.871	74,73	3	Rendah
9.	Kretek	30.879	23.031	74,58	3	Rendah
10.	Temon	29.455	20.967	71,2	3	Rendah
11.	Wates	49.335	34.990	70,92	3	Rendah
12.	Galur	33.084	22.368	67,6	3	Rendah
13.	Panjatan	39.127	28.404	72,59	3	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Disisi lain jumlah penduduk usia produktif akan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir. Hal ini disebabkan semakin tinggi jumlah penduduk usia produktif atau yang masih mampu bekerja meningkatkan produksi sebagai komponen dari PDRB yang menjadi acuan peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Penduduk usia produktif bergerak diberbagai sektor, baik sektor menghasilkan barang, maupun sektor penjualan jasa. Sehingga semakin banyak penduduk usia produktif di suatu wilayah maka semakin baik wilayah tersebut. Dari hasil analisis pada tabel 2 menunjukkan hasil kerentanan dari penduduk usia produktif semua kecamatan di daerah pesisir berkisar di angka 40 % lebih yang artinya posisi setiap kecamatan di daerah pesisir berada di kelas 2 dan 3 yaitu kerentanan sedang dan rendah dari variabel usia produktif.

Tabel 2 Tingkat Kerentanan Usia Produktif di Kawasan Peisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk Jiwa	Usia Produktif	Rasio	Kelas	Tingkat Kerentanan
1.	Purwosari	21.282	9.888	46,45%	2	Sedang
2.	Tepus	37008	16.997	45,92%	2	Sedang
3.	Saptosari	39880	19.577	49,08%	3	Rendah
4.	Tanjungsari	29604	14.053	47,46%	3	Rendah
5.	Panggung	29822	13.697	45,83%	2	Sedang
6.	Girisubo	25.950	11.822	45,55%	2	Sedang
7.	Srandakan	31.245	15.033	47,06%	3	Rendah
8.	Sanden	31.942	15.188	47,54%	3	Rendah
9.	Kretek	30.879	14.631	47,38%	3	Rendah
10.	Temon	29.455	14.232	48,34%	3	Rendah
11.	Wates	49.335	24.425	49,50%	3	Rendah
12.	Galur	33.084	13.602	41,15%	1	Tinggi
13.	Panjatan	39.127	18.999	48,55%	3	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Sumber daya manusia yang berkualitas dan berpotensi salah satunya dipengaruhi oleh mutu pendidikan melalui pemenuhan kebutuhan belajar seperti sarana pendidikan. Dalam mewujudkan tingkat pendidikan yang berkualitas, program belajar sangatlah berpengaruh terhadap prestasi belajar seseorang. Pendidikan yang berkualitas akan mampu menghasilkan siswa yang berprestasi tinggi dan sebagai sumber daya manusia yang berkualitas tinggi pula. Sarana Pendidikan yang dimaksud juga merupakan alat-alat yang dipergunakan siswa dalam membantu proses belajarnya seperti dalam hal ini jumlah sarana belajar. Fasilitas belajar mempunyai pengaruh terhadap prestasi belajar siswa, semakin lengkap fasilitas belajar dan efektif yang artinya secara geografis letak sekolah mulai dari tingkat sekolah dasar sampai sekolah menengah atas mampu mengakomodir jumlah anak yang ada di wilayah pesisir D.I. YOGYAKARTA sehingga dapat menghasilkan siswa dapat belajar lebih baik, mempermudah, mempercepat dan memperdalam proses belajar. Berdasarkan sebaran jumlah sekolah ketersediaan sudah cukup memadai jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dari masing-masing kecamatan. Namun dalam penelitian bahwa lebih ditekankan pada seluruh jumlah fasilitas yang tersedia dikawasan pesisir. Dengan menggunakan skoring dapat diketahui bahwa tingkat kerentanan rendah berada di kecamatan wates. Hal ini menunjukkan bahwa kecamatan wates sebagai ibukota Kabupaten Kulonprogo lebih banyak memiliki fasilitas dibanding dengan kecamatan lainnya.

Tabel 3 Tingkat Kerentanan Fasilitas di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah fasilitas	Kelas	Tingkat Kerentanan
1	Purwosari	36	1	Tinggi
2	Tepus	43	1	Tinggi
3	Saptosari	53	2	sedang
4	Tanjungsari	54	2	Sedang
5	Panggung	48	1	Tinggi
6	Girisubo	48	1	Tinggi
7	Srandakan	40	1	Tinggi
8	Sanden	49	1	Tinggi
9	Kretek	39	1	Tinggi
10	Temon	52	2	Sedang
11	Wates	94	3	Rendah
12	Galur	71	2	Sedang
13	Panjatan	59	2	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Pada dasarnya kerentanan ekonomi merupakan kajian yang dilakukan terhadap aspek yang menjadi kelemahan dan dapat meningkatkan ancaman terhadap pertumbuhan ekonomi dan kinerja wilayah tersebut. Diperlukan identifikasi untuk mengetahui kecamatan mana saja yang tergolong rentan dan tidak sehingga dikemudian hari bisa dibuat suatu strategi untuk mengurangi tingkat kerentanan pada wilayah tertentu. Berdasarkan data badan BPS tahun 2021 yang didapatkan bahwa tidak semua kecamatan memiliki data PDRB sehingga penulis memutuskan untuk menggunakan data PDRB pada skala kabupaten sehingga analisis terkait PDRB dapat dilanjutkan. Data PDRB perkapita di tiga kabupaten menunjukkan bahwa setiap tahun angka PDRB semakin meningkat tetapi tidak secara signifikan. Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul memiliki pertumbuhan PDRB yang cukup baik. Data menunjukkan bahwa tingkat kerentanan PDRB perkapita termasuk dalam kerentanan rendah

Tabel 4 Tingkat Kerentanan PDRB Perkapita di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021

No	Kabupaten	PDRB Perkapita	Kelas	Tingkat Kerentanan
1.	Gunungkidul	13.732.092	3	Rendah
2.	Bantul	14.826.691	3	Rendah
3.	Kulonprogo	12.216.586	3	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Disisi lain masyarakat pesisir D.I. YOGYAKARTA berpendidikan yang lulus Sekolah Dasar atau sederajat kesempatan kerja disektor formal sangat terbatas. Sehingga sektor pertanian yang menjadi peluang bagi masyarakat untuk menopang ekonomi keluarga. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan akan menyebabkan daya beli yang sangat rendah. Tabel 5 menunjukkan bahwa tingkat kerentanan penduduk bekerja di kawasan pesisir D.I. YOGYAKARTA tedapat dikecamatan-kecamatan pesisir Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo. Secara letak administrasi lokasi kecamatan-kecamatan tersebut berada cukup dekat dengan Kawasan Perkotaan Yogyakarta. Jumlah penduduk yang cukup banyak sangat seharusnya diimbangi dengan usia produktif dan jumlah penduduk yang bekerja.

Tabel 5 Tingkat Kerentanan Jumlah Penduduk Bekerja di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Penduduk Bekerja	Rasio (%)	Kelas	Tingkat Kerentanan
1	Purwosari	21.282	14.918	70,10	3	Rendah
2	Tepus	37008	27.896	75,38	3	Rendah
3	Saptosari	39880	28.613	71,75	3	Rendah
4	Tanjungsari	29604	21.224	71,69	3	Rendah
5	Panggung	29822	21.318	71,48	3	Rendah
6	Girisubo	25.950	19.466	75,01	3	Rendah
7	Srandakan	31.245	17.759	56,84	1	Tinggi
8	Sanden	31.942	18.693	58,52	1	Tinggi
9	Kretek	30.879	17.913	58,01	1	Tinggi
10	Temon	29.455	17.926	60,86	1	Tinggi
11	Wates	49.335	30.026	60,86	1	Tinggi
12	Galur	33.084	19.857	60,02	1	Tinggi
13	Panjatan	39.127	24.722	63,18	2	Sedang

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Selanjutnya dari variabel lahan produktif wilayah pesisir D.I. YOGYAKARTA disimpulkan bahwa Kecamatan Girisubo memiliki kelas paling rendah atau memiliki tingkat kerentana paling tinggi dimana

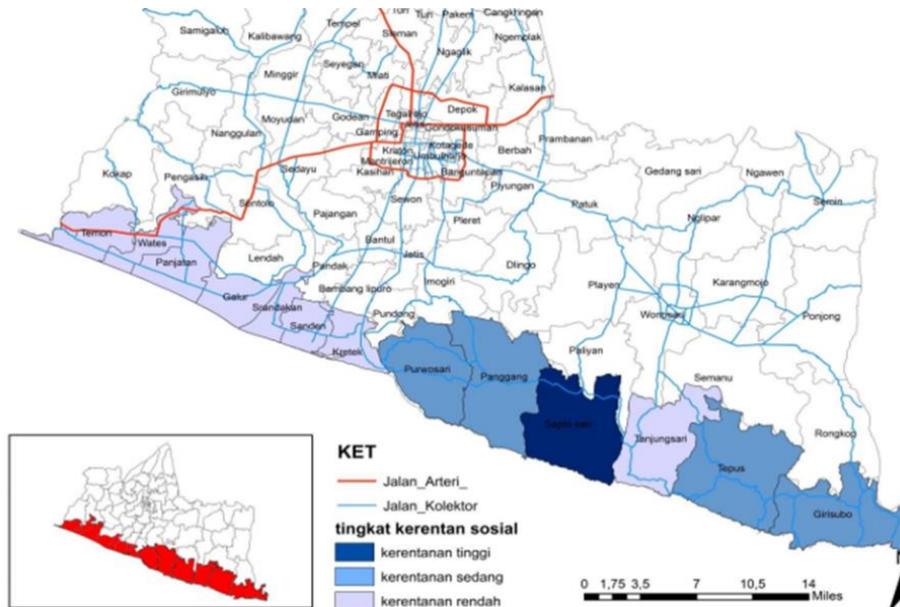
kecamatan tersebut berada paling timur wilayah pesisir, semenatra kecamatan lainnya sudah cukup mampu untuk mengatasi masalah ekonomi dari ketersediaan lahan produktif.

Tabel 6 Tingkat Kerentanan Lahan Produktif di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta Tahun 2021

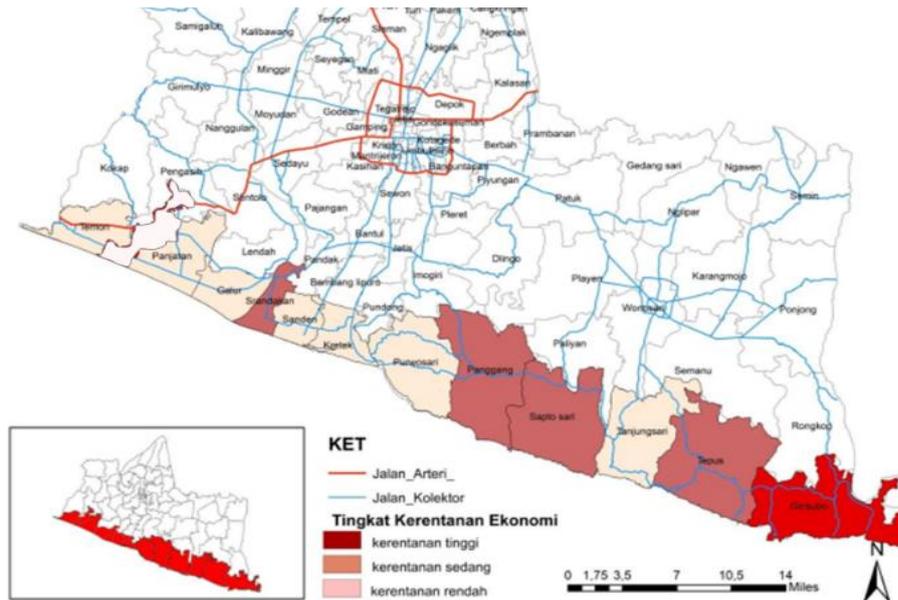
No	Kecamatan	Luas Lahan	Luas lahan Produktif	Rasio	Kelas	Tingkat Kerentanan
1.	Purwosari	6.834	4.732	64,24	2	Sedang
2.	Tepus	10.706	6.779	63,31	2	Sedang
3.	Saptosari	9.339	3.986	42,68	2	Sedang
4.	Tanjungsari	7.127	6.123	85,41	3	Rendah
5.	Panggang	9.886	6.533	66,08	2	Sedang
6.	Girisubo	9.427	1.221	12,95	1	Tinggi
7.	Srandakan	2.015	1.130	56,07	2	Sedang
8.	Sanden	2.357	2.380	96,73	3	Rendah
9.	Kretek	2.658	1.761	66,25	2	Sedang
10.	Temon	3.782	3.629	69,51	3	Rendah
11.	Wates	3.338	1.363	40,08	1	Tinggi
12.	Galur	3.356	1.684	50,17	2	Sedang
13.	Panjanan	4.707	3.590	76,26	3	Rendah

Sumber: Hasil Analisis, 2022

Berdasarkan hasil overlay dari tiga variabel dalam aspek sosial yaitu tingkat Pendidikan penduduk, jumlah usia produktif dan jumlah sarana pendidikan. Dari peta di bawah menunjukkan kerentanan dalam hal sosial dimana kecamatan yang memiliki kerentanan tinggi terdapat 1 kecamatan yaitu Kecamatan Saptosari. Dari segi sosial, variabel yang mempengaruhi kerentanan sosial adalah mata pencarian penduduk yang masih minim dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk Kecamatan Saptosari dan fasilitas sarana pendidikan yang juga masih minim sehingga proses menuntut ilmu tidak cukup maksimal. Sedangkan yang termasuk kerentanan rendah secara sosial terdapat 7 kecamatan yaitu semua kecamatan yang ada di pesisir Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan satu kecamatan di Kabupaten Gunung Kidul yaitu Kecamatan Tanjungsari.



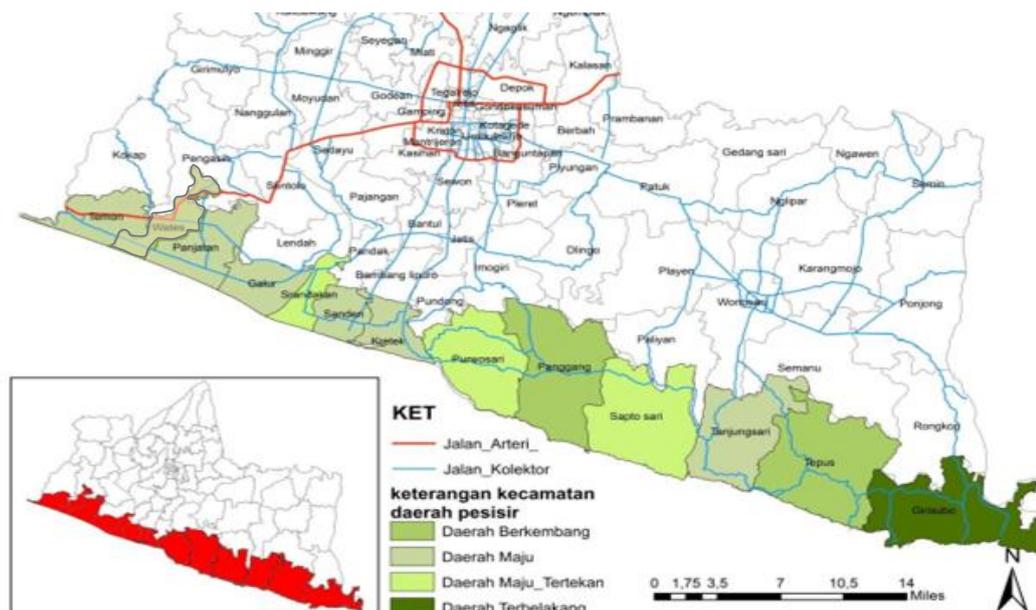
Gambar 1. Peta Tingkat Kerentanan Sosial di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta



Gambar 2. Peta Tingkat Kerentanan Ekonomi di Kawasan Pesisir D.I. YOGYAKARTA

Berdasarkan perolehan hasil dari penghitungan variabel sosial dan variabel ekonomi untuk mengukur kerentanan di bidang social dan ekonomi, perkembangan wilayah di 13 kecamatan dikategorikan kedalam 4 kuadran dengan ketegori yakni Daerah Maju yaitu daerah dengan potensi fisik dan non fisik yang paling baik. Daerah ini memiliki cukup sumber daya manusia dan ekonomi yang cenderung stabil sehingga menunjang daerah untuk dapat berkembang dengan sangat baik. Daerah berkembang berada beberapa level di atas daerah terbelakang. Daerah ini berkembang dengan mulai memanfaatkan potensi fisik dan non fisik yang dimilikinya namun masih terkendala dengan minimnya pertumbuhan ekonomi atau minimnya keuangan sedangkan Daerah terbelakang adalah daerah dengan potensi fisik dan non fisik yang cenderung rendah. Daerah terbelakang merupakan daerah yang kekurangan sumber daya manusia (SDM) dan juga dana sehingga tidak mampu mengembangkan kemampuan atau membangun infrastruktur secara memadai dan maksimal. Dalam bidang sosial dan ekonomi wilayah pesisir. Dari klasifikasi tersebut maka dihasilkan empat tipe perkembangan wilayah di pesisir D.I. YOGYAKARTA.

Secara spasial pada penelitian ini dapat diklasifikasikan bahwa wilayah maju adalah wilayah yang secara ekonomi tergolong kerentanan rendah dan secara sosial termasuk dalam kerentanan rendah. Posisi wilayah tersebut kecenderungannya jauh dari ancaman ekonomi dan kerentanan sosial. Secara spasial wilayah ini sangat dekat dengan area perkotaan Yogyakarta. Daerah yang termasuk dalam kasifikasi ini adalah Kecamatan Tanjungsari, Kecamatan Sanden, Kecamatan Temon, Kecamatan Kretek, Kecamatan Wates dan Kecamatan Galur termasuk Kecamatan Panjatan. Sedangkan wilayah berkembang yakni wilayah yang kerentanan ekonominya tinggi dan kerentanan sosialnya rendah. Wilayah ini terdapat di Kecamatan Tepus dan Kecamatan Panggang. Kedua wilayah ini termasuk dalam lingkup diminstrasi Kabuten Gunungkidul. Selanjutnya wilayah terbelakang berupa wilayah yang kerentanan ekonominya tinggi dan kerentanan sosialnya juga tinggi. Secara keruangan, wilayah ini merupakan wilayah yang berada di ujung daerah pesisir yang cukup jauh dari aerah perkotaan, seperti Kecamatan Girisubo di Kabupaten Gunungkidul. Disisi lain juga terdapat wilayah yang maju tapi tertekan yaitu wilayah yang kerentanan ekonominya rendah tetapi kerentanan sosialnya tinggi. Wilayah ini berada di Kecamatan Purwosari, Kecamatan Saptori, Kecamatan Srandakan. Berikut gambaran klasifikasi perkembangan wilayah berdasarkan tingkat kerentanan sosial dan ekonomi yang dispasialkan melalui peta.



Gambar 3. Peta Perkembangan Wilayah Berdasarkan Kerentanan Sosial Ekonomi di Kawasan Pesisir D.I. Yogyakarta

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan tingkat kerentanan ekonomi terdapat 1 kecamatan yang memiliki kerentanan tinggi secara ekonomi yaitu kecamatan GiriSubo yang berada di kabupaten Gunung Kidul dan variabel ekonomi yang mempengaruhi kerentanan ekonomi wilayah pesisir D.I. YOGYAKARTA, variabel lahan produktif dan mata pencaharian memberikan pengaruh paling besar terhadap tingkat kerentanan ekonomi dikawasan pesisir D.I. YOGYAKARTA. Sedangkan kerentanan rendah secara ekonomi terdapat 8 kecamatan yaitu Kecamatan Wates, Kecamatan Temon, Kecamatan Panjatan, Kecamatan Galur yang berada di Kabupaten Kulonprogo dan Kecamatan Sanden, Kretek yang berada di Kabupaten Bantul dan Kecamatan Purwosari, Kecamatan Tanjungsari yang berada di Kabupaten Gunung Kidul. Sedangkan secara sosial terdapat satu kecamatan yaitu Kecamatan Saptosari yang berada di Kabupaten Gunung Kidul yang masuk dalam kategori rentan. Dari segi sosial variabel yang mempengaruhi kerentanan sosial adalah mata pencaharian penduduk yang masih minim dibandingkan dengan jumlah keseluruhan penduduk kecamatan Saptosari dan fasilitas sarana pendidikan yang juga masih minim sehingga proses menuntut ilmu tidak cukup maksimal. Sedangkan yang termasuk kerentanan rendah secara sosial terdapat 7 kecamatan yaitu semua kecamatan yang ada di pesisir Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Bantul dan Kabupaten Gunungkidul.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Nakamura D. Spatial Policy for a Competitive Regional System: Economic and Social Infrastructure Elements. *J Urban Manag.* 2013;2(1):103–12.
- [2]. Lakshmi SR, Shaji TL. Transformation of Coastal Settlements Due to Tourism. *Procedia Technol.* 2016;24:1668–80.
- [3]. Rostika R, Purba NP, Lutfi M, Kelvin J, Silalahi I. The Managing Plan for Abrasion in Coastal Area of Garut Regency. *Procedia Environ Sci.* 2016;33:512–9.
- [4]. Dawson DA, Hunt A, Shaw J, Gehrels WR. The Economic Value of Climate Information in Adaptation Decisions: Learning in the Sea-level Rise and Coastal Infrastructure Context. *Ecol Econ.* 2018;150(August 2017):1–10.
- [5]. Dariah AR, Salleh MS, Saniff SBM, Ernawati. Comparative study of sustainable development planning in Southeast Asia countries. *Int J Sustain Dev Plan.* 2020;15(4):469–76.
- [6]. Rempis N, Alexandrakis G, Tsilimigkas G, Kampanis N. Coastal use synergies and conflicts evaluation in the framework of spatial, development and sectoral policies. *Ocean Coast Manag.* 2018;(October 2017):0–1.
- [7]. Yusliana, Devi MK. Interaksi wilayah pusat pertumbuhan melalui pendekatan skalogram dan gravitasi di wilayah pesisir daerah istimewa yogyakarta. *Geodika J Kaji Ilmu dan Pendidik Geogr.* 2020;4:148–59.
- [8]. Yusliana Y, Fitria LM, Antus EP, Waskita Utama IA. Distribution Patterns and Settlement Density Using Nearest Neighbor Analysis and Kernel Density Analysis in D.I. Yogyakarta Coastal Areas. *J Geogr.* 2022;14(2):202.
- [9]. Luo E, Kuffer M, Wang J. Urban poverty maps - From characterising deprivation using geo-spatial data to

- capturing deprivation from space. *Sustain Cities Soc* [Internet]. 2022;84(April):104033. Available from: <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104033>
- [10]. Weldearegay SK, Tefera MM, Feleke ST. Impact of urban expansion to peri-urban smallholder farmers' poverty in Tigray, North Ethiopia. *Heliyon*. 2021;7(Juni):1–11.
- [11]. Habibi M, Buchori DI. MODEL SPASIAL KERENTANAN SOSIAL EKONOMI DAN KELEMBAGAAN TERHADAP BENCANA GUNUNG MERAPI (“Spatial Model of Social Economic and Institutional Vulnerability Of Merapi Disaster”). *J Tek PWK* [Internet]. 2013;2(1):2013. Available from: <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/pwk>
- [12]. Hapsoro AW, Buchori I. Kajian Kerentanan Sosial Dan Ekonomi Terhadap Bencana Banjir (Studi Kasus: Wilayah Pesisir Kota Pekalongan). *Tek PWK (Perencanaan Wil Kota)*. 2015;4(4):542–53.
- [13]. Chang Y, Chu K wai, Chuang LZH. Sustainable coastal zone planning based on historical coastline changes: A model from case study in Tainan, Taiwan. *Landsc Urban Plan*. 2018;174(May 2017):24–32.
- [14]. Bishop-Taylor R, Nanson R, Sagar S, Lymburner L. Mapping Australia's dynamic coastline at mean sea level using three decades of Landsat imagery. *Remote Sens Environ*. 2021;267(March):112734.
- [15]. Darmawan, K., Suprayogi A. Analisis Tingkat Kerawanan Banjir Di Kabupaten Sampang Menggunakan Metode Overlay Dengan Scoring Berbasis Sistem Informasi Geografis. *J Geod Undip* [Internet]. 2017;6(1):31–40. Available from: <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/geodesi/article/view/15024>